



MASALAH SOSIAL

## Jogja Banjir Pengemis, Diduga dari Luar Kota

JOGJA-Selama masa pandemi Corona, keberadaan pengemis di jalanan Kota Jogja kian banyak. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ini diduga berasal dari luar kota alias drop-drop, dan ada yang mengkoordinasi.

Sunartono  
[sunartono@harianjogja.com](mailto:sunartono@harianjogja.com)

Agar jumlah pengemis tidak semakin banyak, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan bantuan dan disarankan mengutamakan memberi bantuan kepada orang terdekat.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengatakan saat ini ditemukan banyak PMKS di jalanan. Ia mendeteksi terakhir kali pada

Kelompok ini menggunakan gerobak atau alat tersendiri sehingga diduga dari luar kota.

Sesuai Perda DIY No.1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, orang yang memberikan maupun penerima bisa dikenakan sanksi.

Senin (27/4) malam ada 61 orang PMKS yang berdiri di jalanan di wilayah Kota Jogja dan Sleman, menunggu pemberian sembako. Jumlah itu belum termasuk yang berada di luar kawasan Ring Road. "Jumlah PMKS di jalanan semakin banyak," katanya sesuai mengikuti rapat di Kantor Gubernur DIY di kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Rabu (29/4).

● Lebih Lengkap Halaman 12

### Perda DIY No.1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis



#### Pasal 21

##### Setiap orang dilarang:

- Melakukan pengelandangan dan/atau pengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.
- Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk

maksud melakukan pengelandangan dan/atau pengemis.

- Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pengelandangan dan/atau pengemis.

#### Pasal 22

- Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
- Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber: peraturan.jogja.go.id

## Jogja Banjir...

Noviar menduga kelompok ini merupakan orang drop-dropan dari luar daerah. Berdasar penelusuran, sebagian besar pemulung yang berada di Jogja biasa beroperasi dengan membawa karung. Tetapi kelompok ini menggunakan gerobak atau alat tersendiri sehingga diduga dari luar kota. Satpol PP terus menyelidiki fenomena tersebut.

"Indikasinya memang drop-dropan dari luar kota, tetapi kami belum dapat memastikan karena saat ini masih kami selidiki. Kemungkinan mereka ada yang mengkoordinasikan. Saya pernah bertanya langsung ke mereka," katanya.

Noviar meminta kepada masyarakat selaku donatur yang peduli kepada warga terdampak Covid-19 agar tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apapun, apalagi

sembako kepada PMKS yang berdiri di jalanan. Ketentuan ini telah diatur dalam Perda DIY No.1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, di mana yang memberikan maupun menerima bisa dikenakan sanksi. Dengan tidak diberikan bantuan, harapannya mereka tidak lagi berada di jalanan.

"Kalau mengembalikan ke daerahnya kami kesulitan karena butuh anggaran. Yang kami lakukan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan bantuan orang yang ada jalanan," ucap pria yang mengurus Bidang Penegakan Hukum di Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY ini.

Ketentuannya, kata dia, ada sanksi bagi yang memberikan bantuan kepada PMKS di jalanan. Tetapi sanksi tersebut hanya sebagai upaya terakhir, sehingga

lebih dahulu akan menggunakan imbauan dan sosialisasi.

Bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan diimbau untuk mengutamakan warga di sekitar lingkungannya. Ia menambahkan langkah yang ditempuh saat ini baru sebatas melakukan pendataan kemudian meminta kepada mereka untuk kembali ke daerahnya. "Kalau sanksi sesuai aturan yang memberikan didenda Rp1 juta atau kurungan tiga bulan, tetapi kalau situasi seperti ini diterapkan sanksi ya kurang bijak," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, meminta Pemda DIY untuk segera menangani segala dampak dari Covid-19, terutama banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan. "Dampaknya harus segera ditangani," ujarnya.

| Instansi        | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP   | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Sosial |              |       |                 |

Yogyakarta, 02 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005